

KOMUNIKASI POLITIK TIM PEMENANGAN HENDRA HEMETO DALAM PEMILIHAN KETUA DPD II PARTAI GOLKAR KABUPATEN GORONTALO PERIODE 2016–2021

Yusa Djuyandi

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Email: f_yusa@yahoo.com

ABSTRAK

Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Golkar Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan 28 Agustus 2016 untuk memilih ketua dan pengurus baru berbeda dengan Musda sebelumnya. Salah satunya kandidat yang tidak diunggulkan, Hendra Hemeto, terpilih menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016–2021. Terpilihnya Hendra Hemeto yang mampu mengalahkan Warsito Somawiyono sebagai kandidat terkuat, karena sebelumnya didukung oleh Pimpinan Kecamatan (PK) sebagai pemilik suara, menjadi menarik dikaji dari perpektif komunikasi politik. Kemenangan Hendra Hemeto menarik untuk dikaji terutama berkaitan dengan bagaimana pola komunikasi politik diri dan tim kampanyenya dalam Musda Partai Golkar. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka data penelitian dikaji secara kualitatif deskriptif, yaitu mengkonstruksikan realitas dan makna kultural serta fokus pada proses dan peristiwa secara interaktif. Dari hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan Hendra Hemeto tidak lepas dari pengelolaan komunikasi politik yang baik terutama oleh tim kampanye dirinya

Kata kunci: komunikasi politik, Golkar, Kabupaten Gorontalo, Musyawarah Daerah

POLITICAL COMMUNICATION OF HENDRA HEMANTO WINNING TEAM IN ELECTION OF 2ND REGIONAL COUNCIL HEAD OF GOLKAR PARTY IN GORONTALO REGENCY, PERIOD OF 2016-2021

ABSTRACT

Regional Council (Musda) of Golkar Party in Gorontalo regency which held on August 28, 2016 to elect the chairman and the new official is different with previous Musda. One of the candidate who is not seeded, Hendra Hemeto, was elected as a Chairman of DPD II Golkar Party in Gorontalo Regency, Period of 2016-2021. The election of Hendra Hemeto who able to defeat Warsito Somawiyono as the strongest candidate, because previously supported by the Chairman of the District (PK) as the owner of the vote, being attractive assessed from the perspective of political communication. The victory of Hendra Hemeto is interesting to be studied, primarily concerned with how the patterns of political communication of his campaign team in Golkar Party Musda. To get answers to these questions, then the data examined in a descriptive qualitative research, which is by constructing reality and cultural meaning as well as a focus on processes and events interactively. From the analysis, it can be said that the success of Hendra Hemeto was inseparable from a good political communication management especially by his campaign team

Key words: *political communication. Golkar, Gorontalo regency, regional council*

PENDAHULUAN

Kegiatan pemilihan ketua partai secara langsung merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan suara anggota partai dalam rangka penyelenggaraan demokrasi. dengan pemilihan secara langsung maka anggota diberikan pengakuan untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan organisasi partai tersebut. Pemilihan ketua partai secara langsung oleh anggota partai berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi. Kegiatan pemilihan ketua partai secara langsung juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi anggota partai yang sangat prinsipil.

Penyelenggaraan pemilihan ketua umum partai secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan anggota partai sebagai sumber kehidupan. Proses kedaulatan anggota yang diawali dengan pemilihan akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas bagi ketua dan pengurus yang didukung oleh anggota. Ketua yang dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota akan melahirkan pemimpin dan pengurusan partai yang demokratis.

Pemilihan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo selain sebagai sarana perwujudan kedaulatan anggota partai, juga sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi para calon ketua untuk menunjukkan visi, misi dan program kerja, serta bagaimana kelak jika dirinya terpilih dapat menjalankan fungsi, peran partai dan bertanggungjawab atas kinerja partai. Sebagaimana diketahui bahwa Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensi nya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Disinilah kemudian bagaimana calon Ketua Partai harus mampu memiliki sebuah program yang jelas untuk dapat menunjukkan dan mempertahankan eksistensi partai di masyarakat.

Adapun pergantian kepengurusan dalam Partai Golkar di tingkat daerah dilakukan melalui Musyawarah Daerah (Musda). Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar tingkat daerah yang berfungsi sebagai media untuk

mengevaluasi kinerja partai dan pengurus tingkat daerah yang diselenggarakan setiap lima tahunan, sekaligus juga untuk memilih kembali ketua baru untuk periode selanjutnya. Adapun kepesertaan Musda Partai Golkar Kabupaten Gorontalo adalah perwakilan cabang yang merupakan anggota atau berada di bawah koordinasi dari DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo. Dalam Musda, anggota-anggota partai melakukan musyawarah dalam rangka evaluasi kepengurusan pimpinan partai Golkar di tingkat DPD serta kemudian memilih ketua baru untuk kepengurusan partai Golkar periode berikutnya.

Dalam Musda sebuah Partai, proses pemilihan ketua DPD partai memiliki sebuah dinamika tersendiri yang menarik untuk dikaji, termasuk diantaranya dalam Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo. Salah satu yang menarik untuk dikaji dalam pemilihan ketua DPD partai itu adalah terkait dengan proses komunikasi politik yang dilakukan oleh calon ketua DPD Partai. Untuk menjadi ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo memang dibutuhkan kader berkualitas yang harus sejajar kemampuannya dengan bupati. Sebab ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo juga harus mampu menguasai beberapa isu yang menjadi persoalan daerah dalam rangka membantu mencari solusi dan menunjukkan bagaimana Golkar di tingkat daerah juga peduli atas segala permasalahan yang menimpa rakyat.

Tidak dipungkiri bahwa kekalahan Partai Golkar di Kabupaten Gorontalo pada Pilkada sebelumnya disebabkan oleh ketidakpekaan pengurus dalam melihat persoalan yang ada di masyarakat. Selaku entitas politik terbesar di Gorontalo (jika merunut pada hasil Pemilu 2014) Golkar mengalami kekalahan signifikan di dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, sebagai lumbung pemilih terbesar di Gorontalo jatuh ke tangan non Golkar (Terrajana, 2015). Dalam peta geopolitik Kabupaten Gorontalo terbaru ini, pertarungan yang dahsyat terjadi menjelang pemilihan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo. Musda nanti menjadi titik penting bagi internal Golkar apakah bisa melakukan konsolidasi internal atau malah akan membalikkan keadaan? Dengan kata lain ada tantangan yang begitu besar yang akan dihadapi

oleh calon ketua DPD II, dimana tantangan ini menyangkut kekuatan DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo di internal dan eksternal.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto dalam Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016–2021. Alasan dipilihnya Hendra Hemeto sebagai objek penelitian dalam penelitian komunikasi politik Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo adalah karena dari pra penelitian diketahui bahwa Hemeto dianggap memiliki dukungan seluruh kader-kader Golkar Kabupaten Gorontalo. “Hendra Hemeto yang akrab disapa Dadang ini dipastikan akan mendapat dukungan luar biasa dari berbagai kalangan. Apalagi dukungan terhadap Dadang ini dibuktikan dengan dukungan seluruh kader-kader Golkar Kabupaten Gorontalo” tegas Rolly Hippy selaku Wakil Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Gorontalo (Radar Gorontalo, 2016).

Adanya potensi dukungan penuh ini tidak mungkin akan tercapai jika seandainya tidak ada komunikasi politik yang baik dari Hendra Hemeto maupun tim pemenangannya. Terlebih tantangan yang akan dihadapi Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo begitu besar.

Golkar Kabupaten Gorontalo di kepemimpinan Ketua DPD II yang baru harus bisa terus bertahan jika melakukan hal-hal yang bersifat transformatif. Kelelahan dan kehabisan tenaga mesti segera diobati jika ingin selamat secara jangka panjang. Golkar mesti punya *exit strategy* untuk terus menjadi *becomming*. Kelelahan Golkar jika tidak diatasi akan melahirkan kombinasi dan penguatan kutub politik non Golkar. Kini, kombinasi politik non Golkar juga mengalami pengentalan yang luar biasa. Bagaimana PDIP, Gerindra, Demokrat dan PKS semakin memperkuat basis kaderisasinya, yang berarti struktur organisasi mereka secara internal juga akan semakin kokoh. Inilah tantangan yang kemudian dihadapi oleh Calon Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo, dimana tantangan ini juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat proses komunikasi politik calon ketua kepada anggota, terutama terkait dengan bagaimana cara mereka memperkuat kembali Golkar. Dengan demikian proses

komunikasi politik yang dibangun dalam rangka pemenangan, harus benar-benar dibangun atas dasar program kerja untuk memperkuat partai.

Penelitian tentang komunikasi politik dalam pemilihan ketua DPD Partai Politik merupakan sesuatu yang baru. Penelitian lainnya tentang komunikasi politik hanya mengangkat tentang komunikasi politik dalam pemenangan pasangan calon kepala daerah (Qalbi, 2015; Narendra, 2013; Napitupulu, 2013; Rosit, 2012) serta strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam proses kampanye (Al-Husaini dan Fuady, 2016; Pattiasina, 2015; Herlambang, 2014; Rachmiate, dkk., 2013). Dari kajian penelitian terdahulu tersebut, ada hal yang dapat disetujui yaitu bahwa komunikasi politik yang tepat dapat digunakan untuk memenangkan persaingan politik dalam proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Terkait dengan latar belakang penelitian serta judul yang dirumuskan, maka di dalam penelitian perlu dijelaskan berbagai konsep dan teori yang terkait dengan komunikasi dan komunikasi politik, khususnya yang terkait dengan strategi komunikasi politik. Di samping itu penelitian ini juga menjelaskan tentang konsep dan teori pemerintahan sebagai bentuk penjelasan dari judul. Dengan berbagai konsep dan teori yang dipaparkan maka penelitian ini menjadi semakin komprehensif dan mampu menganalisis fenomena yang terjadi dengan lebih mendalam, melalui berbagai perspektif bidang keilmuan, yaitu ilmu komunikasi dengan ilmu politik atau pemerintahan. Berikut peneliti sajikan beberapa konsep dan teori yang terkait dengan penelitian ini.

Komunikasi

Aktivitas komunikasi merupakan salah satu yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dengannya maka terbangun sebuah interaksi antar manusia dengan tujuan-tujuan tertentu. Everett M. Rogers sebagai mana dikutip oleh Cangara (2008: 20) telah banyak memberi perhatian pada riset komunikasi, bahwa menurutnya komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh mempengaruhi satu sama lain,

sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi (Cangara, 2008: 20). Komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan (Effendy, 2004: 9). Dari hal tersebut dapat diartikan jika tidak terjadi kesamaan makna antara komunikator dan komunikan maka komunikasi tidak terjadi.

Terkait dengan apa yang telah dikemukakan oleh Effendy, kemudian pandangan yang sama tentang komunikasi juga dikemukakan oleh Edwin B Flippo (dalam Mangkunegara, 2011: 145) dimana komunikasi adalah aktivitas yang menyebabkan orang lain menafsirkan suatu ide, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Juga demikian halnya dengan Robbins and Judge (2008: 5) yang mengatakan komunikasi adalah terkait dengan transfer dan pemahaman makna.

Berdasarkan definisi tentang komunikasi, Riswandi (2009:4) menggambarkan bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Komunikasi adalah suatu proses.
- 2) Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan.
- 3) Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang terlibat.
- 4) Komunikasi bersifat simbolis.
- 5) Komunikasi bersifat transaksional.
- 6) Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu.

Politik

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah proses aktivitas (Dan Nimmo, 2005: 8).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan

keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan permuasan keinginan (*statement of intent*) belaka (Ardial, 2010: 23-24). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri.

Komunikasi Politik

Istilah komunikasi politik bukanlah hal yang relatif baru dalam disiplin ilmu politik maupun ilmu komunikasi, komunikasi politik menurut Cangara (2008: 16) merupakan sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas berbagai macam bidang disiplin ilmu, terutama hubungannya dengan proses komunikasi dan proses politik. Istilah komunikasi politik mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond (1960) dalam bukunya yang berjudul *The Politics of the Development Areas*, dia membahas komunikasi politik secara lebih rinci. Menurut Almond (1960: 12-17), definisi komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Surbakti, 2010: 152). Adapun Meadow sebagaimana dikutip oleh Cangara (2008: 35) mendefinisikan komunikasi politik sebagai berikut "*Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for*

political system.” Disini Meadow memberi tekanan bahwa simbol-simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik.

Dari perspektif yang berbeda, Nimmo (2005: 10), juga memberi rumusan komunikasi politik. Dengan memandang inti komunikasi, sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial, Nimmo (2005: 10) merumuskan komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku dalam kondisi konflik.

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff (2008: 24) komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik. Pentingnya peran strategis komunikasi politik juga dapat terlihat dari pandangan McNair (2003) tentang komunikasi politik, namun indikator dari pandangan ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, dimana McNair menyebutkan *“political communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative, and executive decision), and official sanctions (what the state reward or punishes).* Dari apa yang telah dikemukakan oleh McNair bahwa komunikasi politik berbicara tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, otoritas pemerintah yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan baik dalam bidang legislatif maupun eksekutif, dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah.

Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik (Mas’oed dan Andrew, 2000:130). Fungsi dari komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi membawakan arus informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat.

Fungsi komunikasi politik itu terutama dijalankan oleh media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian media massa itu memiliki peranan yang strategis dalam sistem politik. Berarti frekuensi dan intensitas yang lebih besar. Di samping perasaan “sadar informasi” hal itu juga didukung oleh tersedianya fasilitas yang memadai.

Kelancaran komunikasi politik akan sangat berpengaruh pada kemantapan kehidupan politik. Terlambatnya saluran komunikasi politik dapat mengakibatkan munculnya kecurigaan antara satu kelompok lain, antara satu pihak dengan pihak lain. Atas dasar itu, keterbukaan politik ada batasnya, diperlukan dalam pembinaan sistem politik. Maka dari itulah muncul fungsi komunikasi bagi komunikasi politik untuk mempermudah jalannya sistem politik yang ada.

Fungsi yang secara langsung (Mas’oed dan Andrew, 2000: 31) yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan adalah:

a. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Upaya mewujudkan pola hubungan baru yang menampung seluruh kepentingan melalui proses sintesis aspirasi banyak orang itulah yang dinamakan artikulasi kepentingan. Dengan demikian artikulasi dapat juga dikatakan sebagai suatu proses yang mengolah aspirasi masyarakat yang beragam yang akan disaring dan dirumuskan secara teratur yang selanjutnya dilanjutkan dalam kebijakan.

b. Fungsi Agregasi Kepentingan

Pendapat dan aspirasi seseorang atau sekelompok orang akan hilang ditelan oleh hiruk pikuk kehidupan modern apabila tidak dilakukan penggabungan antara beberapa pendapat dan aspirasi yang sama. Fungsi menggabungkan berbagai kepentingan yang hampir sama untuk disatukan dalam suatu rumusan kebijakan lebih lanjut inilah yang dinamakan agregasi kepentingan. Jadi dengan adanya agregasi kepentingan ini bukan lagi kepentingan perorangan/individu yang muncul, akan tetapi kepentingan masyarakat.

c. Fungsi Pembuatan Kebijakan

Fungsi ini merupakan fungsi yang dijalankan oleh legislatif. Untuk menjalankan fungsi itu legislatif bekerjasama dengan lembaga eksekutif badan perwakilan rakyat memiliki

sejumlah hak, seperti *hak prakara (inisiatif)*, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang; *hak amandemen*, hak untuk mengubah rancangan undang-undang; *hak budget*, yaitu hak untuk ikut menetapkan anggaran belanja negara. Di samping itu, badan perwakilan rakyat memiliki *interplasi* yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintahan dan *hak angket* yaitu hak untuk melakukan penyelidikan serta hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah.

d. Fungsi Penerapan Kebijakan

Fungsi penerapan kebijakan atau peraturan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif beserta jajaran birokrasinya. Fungsi penerapan tidak hanya pembuatan rincian dan pedoman pelaksanaan peraturan. Malahan dalam banyak hal harus membeberkan penafsiran atas peraturan tersebut sehingga mudah dipahami dan ditaati oleh warga negara.

e. Fungsi Penghakiman Kebijakan

Fungsi ini untuk menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut persoalan peraturan, pelanggaran peraturan, dan penegakan fakta-fakta yang perlu mendapatkan keadilan. Dengan kata lain fungsi tersebut untuk membuat keputusan yang mencerminkan rasa keadilan apabila terjadi penentangan terhadap peraturan perundangan. Penghakiman peraturan pada dasarnya bertujuan menjamin kepastian hukum tercapainya suasana tertib dalam masyarakat.

Dengan demikian fungsi komunikasi politik secara totalitas, yaitu mewujudkan kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional. Fungsi komunikasi politik dalam hubungan antara suara dan infrastruktur politik, berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat interdependensi dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara.

Strategi Komunikasi Politik

Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Ardial, 2010: 73). Karena pada kenyataannya

keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Setelah itu, langkah yang tepat bagi seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan antara lain dengan merawat ketokohan yang telah melekat pada diri komunikator politik tersebut serta memantapkan kelembagaan politiknya.

Menurut Ardial (2010:73) ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Dari pandangan itu kemudian Ardial menentukan bahwa strategi komunikasi politik ditentukan oleh beberapa hal, yakni: keberadaan pemimpin politik, ketokohan dan kelembagaan, menciptakan kebersamaan, negosiasi, dan membangun konsensus.

Sedangkan menurut Anwar Arifin (2011: 235) strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan terutama dalam hal untuk memenangkan Pemilu. Lebih lanjut Arifin mengungkapkan bahwa strategi komunikasi politik yang menurutnya dianggap tepat bagi komunikator politik adalah melalui merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus.

Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan dalam kemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu. Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 1995: 32).

METODE

Penelitian dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yaitu dari informan dan observasi, serta data sekunder di lapangan. Untuk itu desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dipilih dan dianggap tepat karena metode kualitatif relevan dan cocok dengan masalah penelitian yang diajukan melalui interpretasi proses dan makna.

Sumber data ini terbagi menjadi dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan informan. Data sekunder yang dijangkau adalah melalui studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Informan yang dipilih adalah para pengamat di bidang politik, Hendra Hemeto selaku Calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Gorontalo, dan Dewan Pimpinan Cabang (Tingkat Kecamatan) Partai Golkar Kabupaten Gorontalo. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai sumber media yang dijadikan sebagai alat komunikasi politik dalam proses pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo, hasil studi dari berbagai literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan dan kebenaran data (*credibility*) yang diperoleh dari informan-informan yang terlibat dalam pembentukan komunikasi politik maupun yang mengetahui tentang strategi komunikasi politik Hendra Hemeto selaku Calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Gorontalo, kebenaran (*correctness*) suatu deskripsi, simpulan, dan penjelasan (*explanation*) yang dapat diketahui dari kesesuaian dengan peraturan perundangan serta naskah/dokumen penting lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ketua DPD II Partai Golkar adalah sangat penting bagi eksistensi Partai Golkar di daerah, termasuk diantaranya di Kabupaten Gorontalo. Persoalan yang saat

ini menimpa partai Golkar di Kabupaten Gorontalo, dimana dalam Pilkada sebelumnya harus kalah dari partai pesaing, padahal Gorontalo merupakan basis terbesar suara Golkar pada Pemilu 2014 menjadi sebuah tantangan yang harus dipecahkan oleh setiap calon Ketua DPD II Golkar Kab. Gorontalo. Dengan kata lain dengan persaingan politik yang semakin ketat, maka calon ketua DPD II Golkar Kab. Gorontalo harus memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik dalam menyampaikan visi, misi, ide ataupun gagasannya dalam rangka memajukan partai Golkar di Kabupaten Gorontalo, termasuk diantaranya bagaimana membangun komunikasi politik yang baik dengan masyarakat dalam rangka membantu masyarakat dan memperkuat basis suara di masyarakat itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melihat dan menganalisis bagaimana kemudian komunikasi politik yang dibangun oleh salah satu calon Ketua DPD II Golkar Kab. Gorontalo, yaitu Hendera Hemeto yang juga akrab dipanggil Dadang. Terkait dengan bagaimana Hemeto dalam proses komunikasi politiknya mengungkapkan tentang “Sebagai partai tua yang sudah cukup mapan, Partai Golkar memiliki beberapa potensi kekuatan untuk memenangkan Pemilu dan Pilkada mendatang.” Hal ini menunjukkan tentang bagaimana orientasinya dan juga caranya dalam meyakinkan anggota partai Golkar di Kabupaten Gorontalo.

Model Komunikasi Politik Hendra Hemeto dalam Proses Sosialisasi Melalui Implementasi Paradigma Baru

a. Model Komunikasi Politik Persuasif Terkendali dalam Proses Sosialisasi Paradigma Baru

Cara yang dapat dilakukan oleh Calon Ketua DPD II Golkar dalam membangun komunikasi politik di internal adalah dengan menyampaikan paradigma baru partai. Hal ini penting tatkala posisi Golkar di masyarakat sudah mulai menurun atau kehilangan kepercayaan akibat beberapa kasus yang pernah menimpa anggotanya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyampaian paradigma baru Partai Golkar oleh Ketua DPD Partai Golkar

tidak akan berhasil bila dilakukan secara otoriter, oleh karena itu bagi calon Ketua DPD II Golkar pendekatan yang mesti dilakukan adalah dengan komunikasi persuasif dialogis, sehingga ditemukan kesamaan makna dalam memahami paradigma baru tersebut, sebagaimana dijelaskan Effendy (1986) bahwasanya komunikasi akan terjadi dan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan.

Sosialisasi paradigma baru berada pada komunitas masyarakat sebagai makhluk dinamis dan selalu bergerak ke arah perbaikan dan pembaharuan. Fenomena ini mengharuskan Calon Pimpinan Partai Golkar, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, harus mampu memahami paradigma baru dalam konteks kekinian, artinya mampu melakukan sosialisasi dan adaptasi antara aturan-aturan paradigma baru dengan persoalan-persoalan yang dihadapai Partai Golkar saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Soemarno (2002), pertemuan antara unsur dinamis memberi petunjuk, bahwa sosialisasi berada di tengah-tengah masyarakat yang bersifat dinamis dan bergerak ke arah kondisi yang lebih baik.

Konsolidasi yang dilakukan para calon Ketua DPD II Partai Golkar terhadap jajaran di bawahnya memungkinkan untuk bisa melakukan sosialisasi di sela-sela acaranya, dalam kesempatan tersebut ada peluang untuk melakukan komunikasi persuasif, dengan memberikan rancangan pembinaan yang mengarah kepada aspek-aspek paradigma baru, dengan pembinaan tersebut meskipun ada unsur-unsur yang memungkinkan instruksi, akan tetapi dengan penyampaian komunikasi secara persuasif. Maksudnya, dengan bujukan-bujukan atau tawaran-tawaran yang menjanjikan memberikan harapan perbaikan ke depan bagi para kader dan konstituen. Hal inilah yang peniliti lihat dilakukan oleh Tim Sukses Hendra Hemeto dalam menghadapi Musda II Golkar Kabupaten Gorontalo, sehingga kader-kader Golkar di tingkat kabupaten akan tertarik dan merasa tidak diinstruksi atau diperintah seandainya Hemeto terpilih menjadi Ketua DPD II Golkar Kab. Gorontalo. Harapan-harapan yang telah disampaikan kepada konstituen hendaknya konsisten perwujudannya diupayakan para pengurus Partai Golkar yang kelak dibangun oleh ketua terpilih, karena konsistensi itu untuk mengikat kepercayaan kader.

Pidato politik Calon Ketua yang biasa disampaikan dalam berbagai momen, dimanfaatkan dengan baik oleh Hendra Hemeto dan tim suksesnya dalam rangka usaha memperkenalkan Partai Golkar secara persuasif kepada para kader Partai Golkar dan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Namun menurut pengamat politik di Kabupaten Gorontalo pidato-pidato yang disampaikan sebelumnya juga sudah dikendalikan dan disiapkan melalui pengkajian secara matang agar dapat memengaruhi atau mengubah opini kader dan masyarakat di Kab. Gorontalo, sehingga terbentuk citra positif tentang dirinya dan Partai Golkar Daerah Kabupaten Gorontalo jika dirinya menjadi pemimpin DPD II Golkar Kab. Gorontalo. Seperti yang dijelaskan Arifin (2006) bahwa, komunikasi politik salah satu tujuannya adalah membangun citra positif bagi khalayak. Citra politik terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media politik.

b. Model Komunikasi Politik Banyak Wajah dalam Proses Implementasi Paradigma Baru Partai Golkar

Sebagai partai berpengalaman dan tentu saja dengan berbagai kepentingan layaknya sebuah partai politik, menjadikan Partai Golkar harus tampak lebih fleksibel dalam melakukan implementasi paradigma barunya, sesuai dengan pendapat McLaughlin yang mengartikan implementasi, sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin dan Usman, 2002). Artinya Partai Golkar dapat beradaptasi di berbagai ranah politik, karena Partai Golkar ditunjang dengan sumber daya manusia yang relatif berpengalaman, maka penampilan kader-kader Partai Golkar seringkali mendominasi dan meramaikan persidangan-persidangan di parlemen. Inilah yang kemudian ditonjolkan oleh Tim Sukses Hendra Hemeto, di mana tampak bagaimana Hemeto ingin membawa sebuah perubahan dalam tubuh partai DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo. Fleksibilitas ini juga tidak hanya disampaikan kepada internal kader tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tentang visi dan misi Partai Golkar Kabupaten Gorontalo yang lebih peduli pada permasalahan rakyat.

Adanya pola komunikasi politik yang cukup berbeda dari Hemeto, direspon oleh pengamat politik bahwa hal itu juga tidak

lain karena kepercayaan diri yang dibangun Partai Golkar terhadap kader-kadernya.

“Partai Golkar tidak ragu-ragu lagi mendistribusikan kekuasaannya secara merata tidak terpusat pada satu kekuatan penentu kebijakan. Kelebihan yang dimiliki kader Partai Golkar memungkinkan partai ini dapat memainkan peran politiknya dengan fleksibel, tidak dengan peran-peran yang terbatas pada satu orang. Terlebih di daerah”

Dengan model komunikasi ini, Partai Golkar dan calon pimpinannya di daerah dapat berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal partai secara mudah, karena Partai Golkar memiliki kemampuan bernegosiasi dengan menawarkan program-program kerjasama sesuai dengan kemauan individu ataupun suatu partai politik tertentu. Fleksibilitas kader-kader Partai Golkar yang diprospek menjadi calon pemimpin dapat disaksikan dalam peran komunikasi politiknya di parlemen yang sering tampil dengan wajah-wajah yang variatif. Disisi lain Hemeto menurut Ketua Tim Suksesnya juga berusaha mendongkrak popularitas di daerah, dengan meyakinkan kader dan publik, bahwa dirinya akan membawa perubahan pada kondisi Partai Golkar di Kab. Gorontalo dan Golkar adalah yang partai yang selalu berusaha menjadi penghubung dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, seperti yang dijelaskan Kantaprawira (1984) bahwa, fungsi komunikasi politik adalah sebagai jembatan penghubung bagi berbagai kepentingan masyarakat secara umum dengan pemerintah.

Pentingnya fleksibilitas kader-kader Partai Golkar di tingkat DPD II Kab. Gorontalo terlihat juga ketika Hemeto menyampaikan kepada kader-kader Partai Golkar tentang pentingnya kader Partai Golkar di Kabupaten Gorontalo mampu hidup di organisasi apa saja dan terus beraktivitas di organisasi apapun tersebut. Dengan hidup di organisasi apapun, selama organisasi itu memiliki kontribusi positif buat masyarakat maka langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kekuatan partai. Di samping itu adanya fleksibilitas bagi kader untuk ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan akan dapat mengasah jiwa kepemimpinan kader yang bersangkutan. Fleksibilitas melalui keaktifan kader dalam berbagai organisasi masyarakat

inilah yang dinamakan sebagai implementasi paradigma baru Partai Golkar (*Multi Face Political Communication Model*).

Proses Komunikasi Politik

Dari hasil wawancara dengan Tim Sukses, diketahui bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Hendra Hemeto dalam pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Komunikasi politik pada pemilihan tersebut merupakan komunikasi awal yang akan dilanjutkan setelah pemilihan selesai. Hal ini merupakan komunikasi tindak lanjut dari hasil komunikasi awal pada pemilihan tersebut. Proses komunikasi politik tersebut akan berjalan dengan baik jika melibatkan unsur proses komunikasi. Unsur komunikasi politik khususnya pada pemilihan umum antara lain:

a. Pelibat (aktor atau partisipan)

Pelibat dalam unsur komunikasi politik bisa berupa perseorangan, ataupun kelompok. Dalam pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Gorontalo, semua pelibat atau aktor tersebut melakukan komunikasi dengan tujuan menyampaikan pesan politik kepada pihak tertentu dari berbagai kalangan. Aktor yang terlibat secara langsung dalam pemilihan ketua dengan melakukan komunikasi yaitu para Ketua DPC Partai Golkar serta anggota kader Partai Golkar di Kabupaten Gorontalo. Dalam pemilihan Ketua DPD Partai Golkar, biasanya para calon ketua tersebut mewakili suatu golongan atau kelompok tertentu, sehingga setiap calon pemimpin melakukan strategi yang berbeda-beda agar bisa menarik massa yang lebih banyak lagi. Para calon tersebut merupakan aktor yang berupa individu, jadi mereka memerlukan para partisipan untuk mendukung kegiatan politik. Aktor yang mencalonkan diri didukung oleh orang-orang yang memiliki kesepahaman visi dan misi. Orang-orang tersebut merupakan para partisipan atau aktor yang berupa kelompok tertentu dengan melakukan komunikasi politik untuk mendukung terpilihnya para calon pada saat pemilihan umum berlangsung. Para partisipan ini di Indonesia disebut tim sukses.

b. Pesan

Tujuan utama dalam berkomunikasi yaitu

menyampaikan informasi atau pesan tertentu. Begitu pula dengan komunikasi politik. Komunikasi politik dilakukan agar pesan yang terkandung bisa tersampaikan dengan baik. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik adalah pesan yang signifikan mengarah pada politik atau berkaitan dengan politik. Dalam pemilihan ketua DPD II Partai Golkar Kab. Gorontalo, pesan yang disampaikan mengandung kepentingan publik, yakni tidak hanya berguna bagi anggota partai tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Pesan dalam politik terutama pada pemilihan mengandung pula keadilan secara idiologis. Ketika para anggota atau kader merasa pesan politik yang disampaikan mengandung keadilan maka bisa dipastikan konflik yang sebelumnya ada antar kandidat ketua DPD II akan terselaikan. Namun, jika anggota lain merasa pesan politik yang disampaikan tidak mengandung keadilan, maka akan timbul banyak konflik.

c. Saluran (*channel*)

Saluran dalam hal ini bisa berupa media atau alatnya dan bisa juga berupa tindakan. Media saluran dalam komunikasi cukup banyak jenisnya, yaitu berupa organisasi atau institusi, sekolah, serta media massa. Sedangkan saluran berupa tindakan, yaitu pemberian suara, aksi mogok yang menuntut perbaikan kondisi, serta aksi-aksi protes dan demokrasi lainnya. Jika dilihat dari segi komunikasi politik dalam pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Gorontalo, maka saluran yang paling berpengaruh yaitu berupa media massa dan organisasi.

Media massa merupakan salah satu media yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu calon. Hampir semua komunikasi dari berbagai calon diliput oleh media massa. Semua calon pun berlomba-lomba memanfaatkan media massa ini untuk menyampaikan pesan kepada kader di tingkat cabang maupun seluruh masyarakat. Berita yang disampaikan di media massa bisa berupa berita baik ataupun berita buruk, hal ini tergantung dari komunikasi yang disampaikan oleh para calon sesuai atau tidak.

Dengan arus teknologi, rasanya media menjadi saluran utama untuk mempengaruhi atau merubah pandangan masyarakat khususnya terhadap calon-calon tertentu, hal inilah yang kemudian dilihat dan dimanfaatkan betul oleh

tim sukses calon Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo, yaitu Hendra Hemeto. Perkembangan pesat media yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat dimanfaatkan oleh calon yang akan berkompetisi, adapun saluran media yang digunakan oleh tim sukses calon Hemeto adalah media cetak lokal dan radio lokal serta media online.

d. Strategi

Bagi tim sukses Hendra Hemeto, untuk memenangkan pemilihan Ketua DPD II Golkar Kab. Gorontalo, selain diperlukan adanya saluran media, diperlukan juga adanya strategi komunikasi politik yang tepat. Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses Hemeto mempunyai sasaran terhadap khalayak (anggota kader pemilih), oleh karena itu sangat diperlukan keahlian dalam menghadapi sebuah kontestasi. Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Jika tidak ada strategi komunikasi yang baik dan efektif dari proses komunikasi, bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif.

Strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang dijalankan saat ini, untuk mencapai tujuan politik masa depan. Sedangkan merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya, merupakan keputusan strategis yang paling tepat bagi komunikator politik untuk memenangkan pemilu (Arifin, 2011: 236). Oleh karena itu, arah strategi yang jelas dan disepakati bersama akan menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat.

Strategi komunikasi yang tepat mempunyai keterkaitan dengan pesan dan media komunikasi, yaitu pesan dalam kampanye politik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan atau anggota yang bersangkutan. Misalnya, komunikator dalam melakukan kampanye diharapkan untuk mengirimkan pesan dengan bahasa yang mudah diingat dan dimengerti. Namun persoalan yang sering muncul terkait pesan politik adalah pesan yang dikampanyekan secara terbuka, biasanya memiliki kecenderungan untuk seragam baik secara substansi maupun secara kemasan dengan kandidat yang lain. Untuk hal mengatasi hal ini maka tim sukses Hendra Hemeto sudah mempertimbangan betul substansi atau

kemasan apa yang sekiranya mudah di ingat dan dimengerti oleh kader atau anggota dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo.

SIMPULAN

Kegiatan komunikasi politik berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik merupakan pesan yang mengandung nilai-nilai politik. Tujuan komunikasi dalam politik lebih cenderung persuasif (mempengaruhi) daripada sekedar menyampaikan informasi. Fungsi dari komunikasi politik pun lebih luas daripada komunikasi biasanya, yaitu sebagai suprastruktur dan infrastruktur dalam ruang lingkup negara. Jadi, komunikasi politik harus memiliki orientasi kepada kepentingan rakyat. Kegiatan komunikasi yang dilakukan di dalam pemilihan ketua DPD II Partai Golkar Kab. Gorontalo, khususnya oleh Tim Sukses Hendra Hemeto, melibatkan semua unsur dalam komunikasi politik seperti pelibat, pesan, dan media terdapat di kegiatan tersebut. Para komunikator politik yang terlibat dalam tim sukses dalam pemilihan adalah komunikator profesional, serta aktivis. Kunci kesuksesan dari pemilihan yang dilakukan oleh Hendra Hemeto dan timnya adalah komunikasi politik yang baik dan menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husainni, Y.D., & Fuady, M.E.. (2016). Strategi Komunikasi Politik Kader Muda Partai Gerindra. *Hubungan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 257-265.
- Almond, G.A., & Coleman, J.S. (Ed.). (1960). *The Politics of The Developing Areas*. Princenton NJ: Princenton University Press.
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Cangara, H. (2008). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Effendy, O.U. (2004). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cetakan kesembilan belas. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Herlambang, B.P.S. (2014). *Strategi Komunikasi Politik Partai Gerindra (Studi Kasus Strategi Pemenangan Pemilu Legislatif Kota Malang 2014)*. Skripsi pada Universitas Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kaid, L.L. & Holtz-Bacha, C. (2008). *Encyclopedia of Political Communication*. Volume 1 & 2. California: SAGE Publication
- Mangkunegara, A.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Edisi Kespuluh. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mas'ood, M. & Mac Andrews, C. (2000). *Pembandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- McNair, B. (2003). *An Introduction to Political Communication*. New York – London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Mulyana, D. (2004). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, E.W.B. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Hulman Sitorus, SE dan Drs. Koni Ismail Siregar pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Pematangsiantar 2010). *Jurnal Ilmu Komunikasi Flow*, Vol. 2, No. 7, 1-9.
- Narendra, R.A. (2012). Strategi Komunikasi Politik Pasangan Bambang-Icek dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1, 1-14.
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pattiasina, H.Y. (2015). Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten

- Maluku Tengah Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 19 No. 1, 17-27.
- Qalbi, N. (2015). Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pasangan Muhammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013. *Jurnal Sosial Ilmu Politik*, Vol. 1 No.2, 231-238.
- Rachmiate, A., dkk. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *Mimbar*, Vol. 29 No. 2, 123-132.
- Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi* (cetakan Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Rosit, M. (2012). Strategi Komunikasi Politik dalam Pilkada. (Studi Kasus Pemenangan Pasangan Kandidat Ratu Atut dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011). Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Website**
- Radar Gorontalo*. (2016, Juni 6). Diakses 16 Oktober 2016, dari Radar Gorontalo: <http://radargorontalo.com/golkar-ditangan-indra-dadang/>
- Terrajana, S. (23 Desember 2015). *DeGorontalo*. Diakses 16 Oktober 2016, dari DeGorontalo: <http://degorontalo.co/politik-gorontalo-generasi-z-dan-mungkin-golkar-lelah-oleh-funco-tanipu/>